

## PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT PESISIR (STUDI KASUS: MASYARAKAT PESISIR KENJERAN, SURABAYA, JAWA TIMUR)

Mauludiyah<sup>1</sup>, Asri Sawiji<sup>1</sup>, Moh. Sholeh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: [mauludiyah@uinsby.ac.id](mailto:mauludiyah@uinsby.ac.id), [sawiji.asri@uinsby.ac.id](mailto:sawiji.asri@uinsby.ac.id)

### Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan pesisir merupakan hal klasik yang sulit untuk ditanggulangi. Permasalahan sampah tidak hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kenjeran, tapi juga akan berdampak pada penurunan produktivitas ikan dan selanjutnya akan berdampak terhadap perkonomian dan juga kesehatan masyarakat. Temuan penelitian ini, ada tiga permasalahan utama yang teridentifikasi dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kenjeran yaitu tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai, lemahnya atau terbatasnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat, dan belum efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Sebagian warga sudah membuang sampah di bak/tempat sampah rumahnya, tetapi apabila tempat sampah tersebut sudah penuh maka langsung dibuang ke laut atau warga setempat menyebutnya dengan istilah *gancaran*. Kebiasaan *gancaran* disebabkan karena tidak adanya petugas kebersihan yang mengangkut sampah permukiman menuju tempat penampungan sementara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung serta mencatat dan mendokumentasikan gejala-gejala yang ditemukan di lapangan. Sebagian besar penduduk kelurahan Sukulilo baru adalah etnis Madura yang mempunyai kepatuhan secara hierarki terhadap figur-figur utama yaitu orang tua, guru (ulama), dan pemimpin formal. Kearifan lokal orang Madura yang menghormati guru (ulama) sebagai budaya yang dijunjung dapat mengoptimalkan pemberian motivasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Peran ormas setempat dan lembaga-lembaga lain di bawahnya dalam memberikan sosialisasi dan motivasi melalui pengajian rutin yang diadakan tiap-tiap lembaga, akan dapat meningkatkan usaha pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat pesisir. Optimalisasi peran ormas setempat dalam pelaksanaan model ini adalah bagaimana mengubah paradigma “membuang sampah” menjadi “memanfaatkan sampah”, dengan cara mendidik masyarakat secara terencana, mandiri dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar. Prinsip pengelolaan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*) dapat dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir sebaiknya menggunakan pendekatan yang bersifat *bottom up*, sehingga dapat langsung menyentuh sasaran kelompok masyarakat.

*Kata Kunci* : masyarakat pesisir, pengelolaan sampah, kenjeran, bank sampah

### PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan suatu ekosistem yang dinamis, yang terdiri dari subsistem lahan dan perairan pesisir yang saling berkaitan. Wilayah pesisir juga mempunyai potensi sumberdaya alam yang produktif, baik sumberdaya alam hayati maupun non hayati. Namun di sisi lain, wilayah pesisir juga mempunyai beberapa permasalahan dalam pengelolaannya, baik dalam hal lingkungan maupun sosial ekonomi. Sama seperti wilayah pesisir lainnya, kawasan pantai Kenjeran, yang terletak di timur-laut Surabaya, juga mengalami beragam permasalahan, antara lain permasalahan kelembagaan yang tampak dari

adanya konflik kepentingan, kerusakan lingkungan serta ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kenjeran adalah sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh kota yang terletak dekat dengan pantai atau pesisir. Hal ini dikarenakan karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sungai akan bermuara di laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat setempat yang masih mengandalkan laut untuk tempat membuang sampah. Di pesisir Kenjeran, kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan

lingkungan ini dapat dilihat dari sampah yang berserakan di sepanjang jalan, sungai yang menuju laut, tepi laut, atau bahkan menumpuk di berbagai tempat tertentu (Gambar 1).

Dalam jangka panjang, permasalahan sampah ini tidak hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kenjeran, tapi juga akan berdampak pada penurunan



Gambar 1. Kondisi lingkungan di sekitar pemukiman masyarakat pesisir Kenjeran (Sumber: Dokumentasi peneliti, 2015)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kenjeran, (2) menginventarisasi permasalahan dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kenjeran, (3) memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat pesisir. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah serta dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan persampahan di wilayah pesisir.

## TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi ini bisa juga dikembangkan karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan,

produktivitas ikan dan selanjutnya akan berdampak terhadap perekonomian dan juga kesehatan masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Pramono & Sulistyarso (2013) yang menyatakan bahwa penyediaan tempat sampah terpusat dan tempat sampah bagi setiap kepala keluarga merupakan prioritas utama dalam arahan pengembangan sektor ekonomi lokal di pesisir Kenjeran.

pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Victor, 2001).

Secara lebih detail, Syarief (2001) menyatakan bahwa di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Kedua kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja di sekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa

ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawa ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Nopember 2015 di RT 3-4 RW 2, Kelurahan Sukolilo Baru, yang merupakan bagian dari kampung nelayan pesisir Kenjeran (Gambar 2). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu.



Gambar 2. Batas Wilayah Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Surabaya

Metode tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi masyarakat pesisir, kesadaran masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah, pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah,

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

Agar mendapat data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung serta mencatat dan mendokumentasikan gejala-gejala yang ditemukan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kenjeran

Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R yaitu *reduce* (mengurangi sampah), *reuse* (memanfaatkan sampah), dan *recycle* (mengolah sampah) di suatu wilayah dapat dikaitkan dengan tingkat kualitas lingkungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan bak/tempat sampah di setiap rumah, kebersihan lingkungan rumah, respon masyarakat terhadap pengolahan sampah, serta adanya kegiatan yang mengarah pada pola hidup dan lingkungan yang sehat.

Tingkat kepedulian masyarakat setempat terhadap pengelolaan sampah dapat dikatakan masih sangat rendah, ini dapat dilihat dari tidak difungsikannya bak sampah di halaman rumah warga secara baik. Dari hasil observasi, sebagian besar warga setempat masih membuang sampah sembarangan.

Meskipun sebagian warga sudah membuang sampah di bak/tempat sampah masing-masing, tetapi apabila tempat sampah tersebut sudah penuh maka langsung dibuang ke laut atau *gancaran*. Gancaran adalah sebutan masyarakat setempat untuk lokasi pembuangan sampah di pesisir. Apabila gancaran telah terisi setengah penuh, selanjutnya akan diisi dengan pasir/tanah dan digunakan untuk pemukiman

atau tempat untuk menjemur ikan. Akibatnya, sampah menumpuk di *gancaran* yang berada di dekat laut dan juga meluber di sepanjang pesisir laut.

Selanjutnya, ketika musim hujan *gancaran* tersebut akan dipenuhi oleh air hujan sehingga baunya semakin membusuk. Meskipun setiap harinya timbul bau sampah yang menyengat, tetapi warga setempat masih saja membuang sampah di tempat yang sama. Meskipun demikian, sebagian besar warga setempat merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya, meskipun kondisinya kotor dan bau busuk akibat sampah. Hal ini dikarenakan mereka sudah sangat lama tinggal di daerah tersebut serta terkait dengan mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan.

Sebelum menjadi pemukiman penduduk seperti sekarang, lokasi tersebut awalnya merupakan *gancaran*. Sejak dahulu warga sekitar membuang sampah di *gancaran*. Sebagian besar warga tidak memikirkan dan tidak mengetahui mengenai dampak membuang sampah ke laut, termasuk dampak dari air kotor yang setiap harinya digunakan untuk mencuci teripang dan hasil laut yang lain. Hal ini dikarenakan menurut mereka laut adalah tempat pembuangan sampah yang alami, dengan kata lain sampah akan hilang karena terbawa arus laut. Selain itu kebiasaan membuang sampah di laut sudah dilakukan dari dulu karena dianggap lebih praktis dan dekat. Namun seiring dengan semakin padatnya penduduk, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan lingkungan menjadi

semakin kotor. Dampak yang paling dirasa adalah menyebabkan para nelayan melaut lebih jauh dari lokasi Kenjeran dikarenakan produksi ikan di lokasi tersebut menurun.

Di sisi lain, pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan masyarakat setempat telah dikoordinir oleh Bank Sampah yang diinisiasi oleh ibu-ibu dari pengajian masyarakat setempat (Gambar 3). Pemilahan dan penimbangan sampah di Bank Sampah tersebut dilakukan seminggu dua kali, yaitu tiap hari Senin dan Kamis pukul 15.00 - 17.00 WIB.

Namun demikian, partisipasi masyarakat setempat terhadap pengelolaan sampah melalui Bank Sampah tersebut belum optimal. Hanya sebagian kecil masyarakat setempat yang memanfaatkan keberadaan bank sampah tersebut untuk mengelola sampah yang dihasilkan.

Kegiatan pengelolaan sampah yang diinginkan sebagian warga adalah kegiatan yang dapat menghasilkan uang, bisa untuk mengisi waktu luang sekaligus menambah penghasilan warga. Kegiatan tersebut sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh bank sampah setempat, yaitu memberi penyuluhan tentang pengumpulan dan pemilahan sampah agar dapat menghasilkan uang. Namun beberapa tahun terakhir kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah tersebut tidak berjalan secara maksimal dikarenakan partisipasi warga yang sangat kurang.



(a)

(b)

Gambar 3. a) Bank Sampah di lingkungan masyarakat setempat; b) Pengumpulan sampah-sampah anorganik di salah satu rumah warga untuk kemudian disetor ke Bank Sampah setempat (Sumber: Dokumentasi peneliti, 2015)

Selain itu, kegiatan lain yang menjadi tempat penyuluhan terkait sampah adalah pengajian ibu-ibu setempat yang diadakan setiap dua minggu sekali. Sosialisasi dari universitas atau perguruan tinggi juga beberapa kali dilakukan, namun hasil dari sosialisasi tersebut hanya dipraktekkan dua atau tiga hari saja. Setelah itu kebiasaan warga yang membuang sampah di sembarang tempat terulang kembali.

## **Permasalahan dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kenjeran**

Berdasarkan temuan penelitian, ada tiga permasalahan utama yang teridentifikasi dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir Kenjeran. Tiga permasalahan tersebut adalah: (1) Tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai, (2) Lemahnya atau terbatasnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat, dan (3) Belum efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

### **a. Tidak adanya fasilitas pembuangan sampah yang memadai, baik tempat pembuangan sampah sementara maupun petugas pengangkut sampah**

Penerapan pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat di wilayah studi tidak diikuti dengan adanya sarana dan prasarana penunjang. Tidak adanya petugas pengangkut sampah di lingkungan setempat dikarenakan tidak adanya iuran yang ditujukan untuk honorarium petugas pengangkut sampah. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka bersedia membayar iuran untuk kebersihan, dengan catatan petugas pengangkut sampah rutin mengangkut sampah yang terkumpul.

Sebelumnya sebagian besar warga merasa kecewa karena petugas tidak rutin mengangkut sampah. Sekitar seminggu sekali atau dua minggu sekali ada petugas dari pemerintah kota yang mengangkut sampah. Namun sejak sekitar tahun 2006 sudah tidak ada lagi petugas yang mengangkut sampah warga.

Akibatnya, sampah meluber hingga ke jalan dan sungai serta menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak enak. Akibat kekecewaan

tersebut, warga setempat membongkar tempat pembuangan sampah sementara/TPS (wadah/sarana pengumpulan sampah setelah tiap-tiap warga mengumpulkan sampah di tempat sampahnya masing-masing) yang ada.

Dari pemantauan tim peneliti, hanya ada satu TPS di lingkungan warga setempat. TPS tersebut tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan warga setempat. Dengan tidak adanya pengangkutan sampah, maka kemudian warga langsung membuang sampah ke laut, dan beberapa warga memilih untuk membakar sampah yang dihasilkan. Saat ini sampah-sampah yang masih diangkut hanya dari rumah-rumah yang lokasinya dekat dengan jalan raya saja.

Di sisi lain, keberadaan tempat pembuangan sampah sementara tersebut juga dirasa tidak efektif karena sebagian besar sampah yang dihasilkan warga adalah sampah organik berupa sisa-sisa olahan hasil laut. Sebelumnya, warga membuang sampah sisa-sisa olahan hasil laut tersebut ke tempat pembuangan sampah. Namun dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, sampah tersebut akan menimbulkan bau busuk, sedangkan petugas pengangkut sampah relatif lama mengangkut sampah tersebut.

### **b. Lemahnya atau terbatasnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat**

Dengan hampir 92% penduduknya bekerja sebagai nelayan maka kehidupan masyarakat setempat sangat berbeda dengan kehidupan di kelurahan lainnya. Sebagian besar nelayan adalah bapak-bapak, mulai beraktivitas malam hari dan pulang keesokan paginya, sekitar jam 7 pagi. Hasil yang didapat kemudian menjadi tanggung jawab isteri, atau sebagian besar ibu-ibu masyarakat setempat, mulai dari membersihkan, menjemur, merebus hingga menjual ke tengkulak. Sebagian ibu-ibu lainnya, mengolah hasil laut tersebut hingga menjadi kerupuk, baik kerupuk mentah ataupun matang yang langsung bisa dijual. Hal ini berlangsung setiap hari, kecuali pada hari Jumat dikarenakan sebelumnya (hari Kamis) tidak ada aktivitas melaut.

Aktivitas harian yang dilakukan masyarakat setempat tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat terhadap pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Sebagian besar masyarakat setempat merasa tidak mempunyai waktu untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah yang dihasilkan. Apalagi ditambah dengan anggapan bahwa kegiatan tersebut tidak mendatangkan manfaat secara langsung, terutama manfaat ekonomi.

Lemahnya atau terbatasnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat dapat juga dilihat dari beberapa program pemerintah yang dijalankan di wilayah tersebut. Program pembangunan untuk perbaikan kawasan permukiman yang telah dilaksanakan di wilayah setempat adalah perbaikan dan pengadaan prasarana dan sarana permukiman seperti drainase, jalan, persampahan, air bersih, dan lain-lain. Program tersebut adalah KIP-K (*Kampung Improvement Program-Komprehensif*) pada tahun 2003, NUSSP (*Neighbourhood Upgrading and Shelter Sector Program*) tahun 2007, dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) tahun 2008. Namun demikian, implementasi program pembangunan perbaikan lingkungan permukiman di atas tersebut kurang berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi masyarakat setempat.

### c. Belum efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat

Komunikasi menjadi hal yang penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam kerangka pengelolaan pesisir terpadu, dalam hal ini pengelolaan sampah berbasis masyarakat pesisir. Dari hasil observasi, teridentifikasi bahwa pemerintah setempat belum memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah melalui Bank Sampah setempat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Kelurahan Sukolilo Baru, terlihat bahwa pihak pemerintah setempat pesimis dengan terjadinya perubahan masyarakat setempat, terutama dalam hal pengolahan sampah. Kepala Kelurahan menyatakan telah banyak program dari pemerintah maupun pelaksanaan penelitian dan pengabdian

masyarakat dari perguruan tinggi terkait pengolahan sampah yang dilakukan di daerah tersebut, namun demikian perubahan perilaku masyarakat setempat dalam membuang dan mengolah sampah tidak kunjung terjadi.

Di sisi lain, masyarakat setempat merasa pihak pemerintah setempat tidak mendukung atau menindaklanjuti kegiatan pengolahan sampah yang telah dilakukan. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan adanya indikasi belum efektifnya komunikasi antara pemerintah setempat dengan masyarakat setempat.

### Rekomendasi Sistem Pengelolaan Sampah Secara Mandiri Berbasis Masyarakat Pesisir

Strategi pengelolaan sampah secara mandiri yang direkomendasikan harus mampu beradaptasi dengan kelangsungan hidup masyarakat pesisir di wilayah studi. Masyarakat di wilayah studi masih menggunakan adat dan budaya daerah yang didominasi masyarakat perantauan dari Madura yang sebagian besar beragama islam.

Menurut Kusnadi (2003), selain penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, nilai-nilai budaya masyarakat Madura dapat dilihat dari penempatan bahasa Madura dan agama Islam sebagai identitas utama etnik Madura. Etnik Madura mengerti ungkapan *buppa'*, *babu'* guru rato yaitu kepatuhan orang Madura secara hierarki terhadap figur-figur utama. Pertama, orang Madura harus patuh dan hormat kepada orang tua, yang kedua guru (ulama), dan yang terakhir terhadap rato (pemimpin formal). Kearifan lokal orang Madura yang menghormati guru (ulama) sebagai budaya yang dijunjung dapat mengoptimalkan pemberian motivasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Peran ormas setempat, yaitu Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga lain di bawahnya (Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, dan Pengajian Qoryah Thoyyibah) dalam memberikan sosialisasi dan motivasi melalui pengajian rutin yang diadakan tiap-tiap lembaga, akan dapat meningkatkan usaha pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat pesisir.

Hal ini dikarenakan model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat pesisir menggunakan prinsip 3R yang merupakan

solusi paradigmatik. Optimalisasi peran ormas setempat dalam pelaksanaan model ini adalah bagaimana mengubah paradigma “membuang sampah” menjadi “memanfaatkan sampah”, dengan cara mendidik masyarakat secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar.

Di sisi lain, pembentukan pranata sosial di tingkat RT diperlukan untuk meningkatkan terbatasnya dukungan atau partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat pesisir serta membangun keefektifan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Selain itu, hal tersebut juga diperlukan untuk mengatur sistem pengangkutan sampah komunal pada masyarakat setempat serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Selanjutnya, keberadaan pendamping sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan, termasuk dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat pesisir. Masyarakat tidak langsung dapat berjalan sendiri dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat pesisir, mungkin karena kekurangan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Di sini peran pemerintah, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat sebagai pendamping sangat diperlukan.

Selain itu, peran pemerintah, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat juga diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah secara mandiri, diantaranya dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, peningkatan sarana persampahan dan pengembangan akses terhadap peluang usaha. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

## PENUTUP

Masyarakat pesisir terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai nilai-nilai sosial budaya serta usaha dan aktivitas ekonomi yang khas dan spesifik. Kebutuhan setiap kelompok masyarakat pesisir yang berbeda menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian, setiap program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir, termasuk pengelolaan sampah secara mandiri dengan prinsip 3R, harus dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir sebaiknya menggunakan pendekatan yang bersifat *bottom up*. Namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi, 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan, Yogyakarta: LkiS.
- Nikijuluw, Victor P.H., 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu dalam *Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor (IPB). Hotel Permata, Bogor, 29 Oktober 2001.
- Pramono, R. F. dan Sulistyarto, H., 2013. Pengembangan Ekonomi Lokal di Kawasan Perikanan Berdasarkan Preferensi Masyarakat Nelayan Nambangan Kedung Cowek. *Jurnal Teknik POMITS*, Vol. 2, No. 2.
- Syarief, Efrizal, 2001. Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Majalah PP*, Edisi-25.